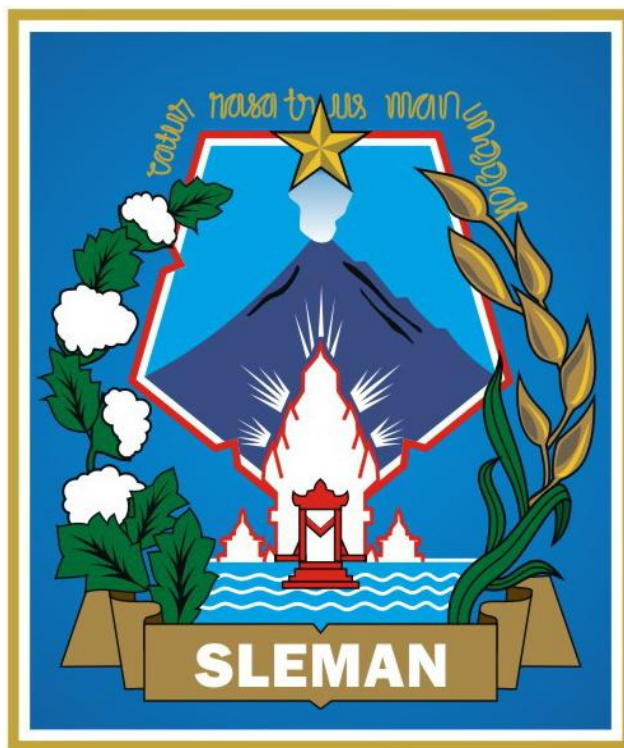


LAPORAN KEUANGAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PER 31 Desember 2019



TAHUN 2019

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

KEPALA DINAS

Drs. PUSTOPO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19610526 198803 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan DPA-SKPD Nomor : 38/1.02.11.01/Kep.Ka.BKAD /DPA-SKPD/2018 tanggal 13 Desember 2018.

Adapun maksud Penyusunan laporan keuangan semester II Tahun Anggaran 2019 adalah agar seluruh proses pengelolaan keuangan, aset dan anggaran SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdokumentasi secara akurat dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah tersajikannya laporan keuangan semester II Tahun anggaran 2019 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta lampiran-lampiran pendukungnya.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan tiap SKPD menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi merupakan pencatatan / penatausahaan atas transaksi keuangan yang terjadi hingga menyusun Laporan Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam anggaran dan barang inventaris yang dikelolanya. Selanjutnya Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2019 SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah dikonsolidasikan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kabupaten Sleman) Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan semester II Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019 disusun dalam rangka pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari DPA-SKPD tahun 2019. Secara akuntansi laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari entitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

1.2. LANDASAN HUKUM DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Semester II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017.
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 113 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017.
6. Keputusan Kepala BKAD Kabupaten Sleman Nomor 16/3.00.01.11/Kep. Ka. BKAD/DPA-SKPD/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sistem Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman Semester II Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entinitas Akuntansi dan Entinitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis aktual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas un Entitas Akuntansi / Entitas pelaporan yang menggunakan basis aktual pada SKPD

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

-

2.2 Kebijakan Keuangan

Diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tahun 2019. Dalam belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diupayakan untuk membiayai program dan kegiatan yang efisien dan efektifitas belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kebijakan-kebijakan yang ditempuh antara lain :

- a. Menjamin alokasi belanja daerah dengan memberikan skala prioritas yang langsung menyentuh masyarakat.
- b. Meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap sebulan sekali dan koordinasi seminggu sekali, paparan capaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran dan penyampaian laporan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang didalamnya termuat laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam belanja daerah melalui pengendalian terhadap belanja yang tidak menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat dan ketajaman tolak ukur kinerja
- d. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara konsisten dan konsekwen dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja adalah, antara lain :
 - Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah
 - Untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas.
 - Mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya sehingga tujuan dan indikator kinerja menjadi jelas.

2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Pelaksanaan program dan kegiatan pada semester II tahun anggaran 2019 telah selesai dilaksanakan sehingga target kinerja dapat tercapai secara efektif dan efisien

dengan telah melaksanakan semua kegiatan yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dapat dilihat dari capaian realisasi keuangan pada semester II tahun 2019 yaitu pencapaian kegiatan mencapai 95,12%.

Yang menjadi faktor pendorong tercapainya keberhasilan program dan kegiatan tersebut adalah komitmen bersama dalam melaksanakan kegiatan, dan tercukupinya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja adalah karena anggaran yang telah direncanakan tidak bisa terealisasi karena skedul yang kurang cermat sehingga kegiatan yang sudah di jadwalkan tidak bisa terealisasi.

2.4 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan beberapa hambatan dan kendala yang ditemui diantaranya adalah :

- a. Pada tahun 2019 ini telah ditetapkan SOTK baru yang mana terdapat perubahan-perubahan dalam tata kelola pemerintahan namun untuk Kecamatan tidak ada perubahan hanya saja ada beberapa pergantian jabatan dan personil dengan adanya penataan SDM yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Oleh karena itu sedikit banyak berpengaruh pada capaian pelaksanaan kegiatan karena personil yang baru masih membutuhkan adaptasi dan pendampingan guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Dengan diterapkannya e-goverment di lingkungan pemerintah yang mana semua pekerjaan telah menerapkan sistem informasi, hal ini terkadang menghambat dalam penyelesaian pekerjaan ketika sistem tersebut harus tergantung kepada sesuatu misalnya terkait dengan jaringan internet maupun SDM yang menguasai tentang hal itu.
- c. Perencanaan yang kurang matang juga sangat berpengaruh pada pencapaian pelaksanaan kegiatan seperti adanya jadwal kegiatan yang terlalu mepet dengan akhir tahun.
- d. Adanya kegiatan yang telah dianggarkan namun tidak bisa direalisasikan dikarenakan kegiatan tersebut telah diampu oleh SKPD lain yang terkait dengan bidangnya

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
KEUANGAN SKPD

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam pelaksanaan APBD semester II Tahun anggaran 2019, dapat kami sampaikan beberapa hal yang merupakan pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya dari APBD dan beberapa cacatan penting yang dapat untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam mengevaluasi laporan pencapaian target Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun Anggaran 2019 pengelolaan keuangan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman telah dilakukan dengan peningkatan pengendalian. Upaya peningkatan pengendalian tersebut dilakukan dengan memperketat prioritas kebutuhan dan penghematan biaya (efisiensi Anggaran) dan tetap mengacu pada prinsip disiplin Anggaran. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan pencapaian target kinerja.

Adapun Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

- Pendapatan :

-

- Belanja :

Penerimaan

SP2D Gaji	: Rp	2.016.826.409,-
SP2D Non Gaji	: Rp	0

Jumlah	: Rp	2.016.826.409,-
--------	------	-----------------

Pengeluaran

SPJ GAJI	: Rp	2.015.846.409,-
SPJ Non Gaji	: Rp	0

Jumlah	: Rp	2.015.846.409,-
--------	------	-----------------

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Belanja langsung SKPD sbb. :

Kode Program	Kode kegiatan	Uraian Kegiatan	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja
00				
	00.00.002	Belanja tidak Langsung		
	00.00.052	Belanja Langsung :		
15				
	00.15.006	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	128.208.750,-	99.85%
	00.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah	7.836.000,-	97.09%
01				
	01.00.007	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	57.600.000	97.30%
	00.01.024	Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan	310.904.550,-	94.34%
	00.01.025	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	558.336.116,-	93.16%
02				
	00.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	851.293.006,-	95.72%
05				
	00.05.009	Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	32.522.000,-	95.48%
06				
	00.15.016	Pemberdayaan koperasi	200.773.800,-	95.26%
	01.00.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1.248.129.549,-	97.92%
	00.16.006	Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan	964.703.375,-	98.75%
	00.16.012	Pengembangan Sarana promosi Hasil Produksi	283.426.174,-	95.17%
	01.00.17	Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.057.205.880,-	91.23%
	00.17.007	Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga	323.539.550,-	96.64%
	00.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	213.295.250,-	81.49%
	00.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha mikro Kecil Menengah	428.943.080,-	91.61%
	00.17.011	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha kecil menengah dan koperasi	29.098.600,-	97.92%
	00.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	62.329.400,-	96.81%
	01.00.18	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.330.235.051,-	96.55%

	00.18.003	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	67.578.200,-	95.37%
	00.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	213.559.120,-	97.26%
	00.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha Koperasi	24.837.769	96.20%
	00.18.012	Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi	420.067.100,-	96.90%
	00.15.002	Program Pengembangan Data/informasi/Statistik Daerah	41.785.950,-	98.86%
	00.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD	20.570.000,-	97.92%
	00.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	13.315.000,-	68%
	00.19.029	Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal	141.250.112.000,-	98.62%
	00.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	2.220.000,-	83.72%

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

-

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah menggunakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Adapun sistem penyusunan laporan keuangan daerah disusun melalui serangkaian proses dan pengumpulan data dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Semester II Tahun 2019.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah, entitas pelaporan keuangan meliputi :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Laporan Keuangan

Sedangkan entitas akuntansi penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan atas Laporan Keuangan

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Semester II Tahun anggaran 2019 adalah menggunakan basis akrual. Dengan dasar ini pengaruh transaksi atau peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Mulai Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan sistem Akrual basic dalam pelaporan keuangan artinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga telah mengikuti sistem ini dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Kecamatan Depok berdasarkan peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan

akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standarisasi akuntansi pemerintah. Dalam kebijakan akuntansi tersebut memuat tentang definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akuntansi dalam laporan keuangan serta prinsip-prinsip penyusunan pelaporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Pada SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah SKPD dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah berpedoman pada sistem akuntansi pemerintah daerah yang meliputi antara lain :

- a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
- b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
- c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah
 - Pengakuan Aset Tetap berdasarkan harga perolehan
 - Aset Tetap sudah dilakukan penyusutan
- d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
 - Transaksi non kas telah di jurnal melalui jurnal non kas

Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana disebutkan diatas disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah.

BAB V
PENJELASAN POS POS
LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian dan Penjelasan masing masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

I. Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.

2.386.545.109,00 yang diperoleh dari komponen sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	2.015.846.409,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	0,00
3.	Honorarium PNS	226.770.700,00
4.	Honorarium non PNS	143.928.000,00
5.	Intensif Retribusi Daerah	0,00
JUMLAH		2.386.545.109,00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar

Rp. **5.389.552.635,00** yang diperoleh dari komponen sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Belanja bahan pakai habis	601.371.225,00
2.	Belanja bahan/material	164.545.200,00
3.	Belanja jasa kantor	1.100.946.469,00
4.	Belanja premi Asuransi	5.979.700,00
5.	Belanja cetak dan penggandaan	421.109.190,00
6.	Belanja sewa gedung/rumah/tanah/parkir	312.950.000,00
7.	Belanja sewa sarana mobilitas	29.580.000,00
8.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	206.158.500,00

9.	Belanja makanan dan minuman	886.569.000,00
10.	Belanja pakaian khusus dan hari – hari tertentu	20.400.000,00
11.	Belanja perjalanan dinas	48.562.045,00
12.	Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis	2.500.000,00
13.	Belanja perjalanan dinas	746.029.049,00
15.	Belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.500.000,00
16.	Belanja Pemeliharaan	276.289.302,00
17.	Uang yang diberikan pada masyarakat/pihak ketiga	96.000.000,00
18.	Belanja tenaga ahli/instruktur/narasumber/akademisi	513.125.000,00
JUMLAH		5.389.552.635,00

2. Neraca

Aset

Aset Lancar

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat aset lancar sebesar Rp. 101.154.650,00 yang berasal dari :

No	Uraian	Realisasi
1.	Kas di bendahara pengeluaran	-
2.	Persediaan	101.154.650,00
JUMLAH		101.154.650,00

Aset Tetap

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat aset tetap sebesar Rp. 1.141.549.870,07 yang diperoleh dari :

No	Uraian	Realisasi
1.	Peralatan dan mesin	2.349.512.739,28
2.	Gedung dan bangunan	58.972.500,00
3.	Jalan, irigasi dan jaringan	9.980.000,00
4.	Aset tetap lainnya	3.954.720,00
5.	Akumulasi penyusutan	(1.280.870.089,21)
JUMLAH		1.141.549.870,07

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Per tanggal 31 Desember 2019 tidak terdapat kewajiban jangka pendek Rp. -

Ekuitas

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat ekuitas yang sebesar Rp.

1.270.704.520.07

3. Laporan Operasional (LO)

Pendapatan – LO

Pendapatan Asli Daerah

-

Beban

Beban Operasi

Beban Operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.

8.008.311.547.40 yang diperoleh dari komponen sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Pegawai	2.386.545.109,00
2.	Beban Barang	5.334.662.085,00
3.	Beban Hibah	0,00
4.	Beban Penyusutan	287.104.353.40
<i>JUMLAH</i>		8.008.311.547.40

Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit – LO per tanggal 31 Desember 2019 sebesar

(8.774.574.757.00)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 925.773.911,14

Surplus/Defisit – LO

Saldo Surplus/Defisit – LO per tanggal 31 Desember 2019 sebesar

(8.008.311.547.40)

RK PPKD

Saldo RK PPKD per tanggal 31 Desember 2019 sebesar 8.355.203.856.33

Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar **1.270.704.520.07**

BAB VI

Penjelasan atas informasi informasi non keuangan SKPD

-

BAB VII
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan semester II Tahun Anggaran 2019 yang dapat kami sampaikan, semoga dapat membantu dalam mengevaluasi Kinerja SKPD Unit Kerja Kecamatan Kalasan.

Kalasan, 31 Desember 2019
KEPALA DINAS

Drs. PUSTOPO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19610526 198803 1 003

